



# EXECUTIVE SUMMARY

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB tersebut terdiri atas 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kabupaten Temanggung saat ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup empat isu yaitu isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Maka pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung.

### 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sedangkan sasarannya:

- a. Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
- b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **1.3. Dasar Hukum Utama**

Dasar hukum utama yang digunakan sebagai acuan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

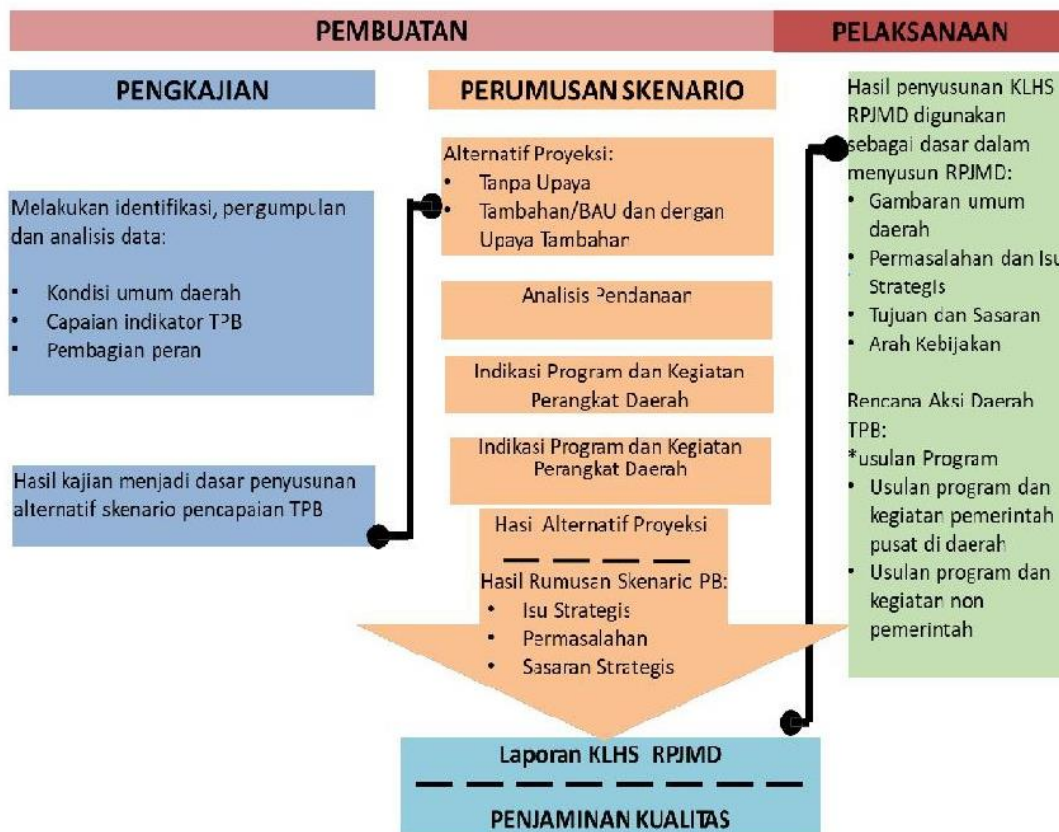
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):

- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**1.4. Metodologi Penyusunan KLHS**

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 7 tahun 2018 pasal 3, proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan yang secara singkat yaitu sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJMD,
- b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan,
- c. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan, dan
- d. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS RPJMD.



**Gambar 1. Tahapan Penyusunan KLHS RPJMD**

## 2. PROFIL WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### 2.1. Luas Wilayah dan Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Temanggung yaitu 87.065 ha dengan batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

### 2.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

### 2.3. Kondisi Fisik

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%.

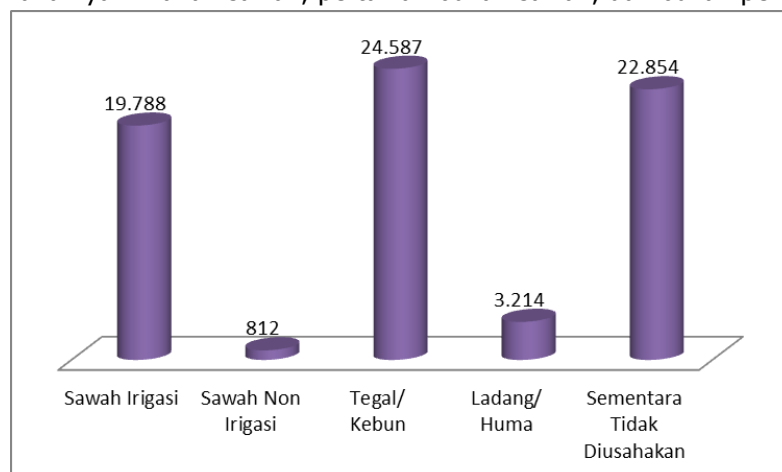
Bentuk Kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, artinya rendah di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Oleh karena itu geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen dari piroklastik gunung api Sindoro – Sumbing dan sekitarnya.

Kondisi geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku terdiri atas material sendimen piroklastik dari Gunungapi Sindoro-Sumbing. Ukuran material piroklastik bervariasi mulai dari blok, krakal, krikil, pasir debu, hingga lempung. Produk aktifitas gunungapi mengalami proses pengendapan di dataran aluvial atau daerah dengan sendimen berlapis dengan ciri material dengan butir besar terdapat di lapisan bawah.

Kabupaten Temanggung memiliki dua musim yaitu : musim kemarau antara bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Curah hujan di Kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 – 3100 mm setahun. Curah hujan di dataran rendah lebih kecil dibandingkan pada dataran tinggi.

### 2.4. Penggunaan Tanah

Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung, didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah. Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung terbagi atas tiga penggunaan lahan yakni lahan sawah, pertanian bukan sawah, dan bukan pertanian.



Gambar 2. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung

## **2.5. Demografi**

Jumlah penduduk pada Tahun 2017 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 772.289 jiwa, terdiri dari laki-laki 387.812 jiwa (50,22 %) dan perempuan 384.477 jiwa (49,78 %) dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88%.

Berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Temanggung, diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Tamat SD sebesar 183,197 jiwa atau 23,72 %, disusul Tamat SLTP sebesar 105.731 jiwa atau 13,69 %. Sedangkan berdasarkan lapangan kerja utama, tertinggi berada di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, dan terendah berada di sektor Listrik, Gas, dan Air.

## **2.6. Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Temanggung meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik.

Keanekaragaman ekosistem terdiri dari Ekosistem Alami (Natural Ecosystem) dan Ekosistem Buatan (Man made ecosystem). Ekosistem alami di Kabupaten Temanggung yaitu ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai) sedangkan Ekosistem buatan di Kabupaten Temanggung yaitu ekosistem pertanian (sawah dan perkebunan) dan ekosistem RTH (RTH Publik dan RTH Privat).

Keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik di Kabupaten Temanggung yang terdiri dari tumbuhan dan satwa terdiri dari berbagai jenis yaitu jenis liar yang belum bernilai ekonomi (belum diperdagangkan secara ekonomi pasar), jenis liar yang sudah diketahui nilai ekonominya (sudah diperdagangkan secara ekonomi pasar), dan jenis yang sudah dibudidayakan (keanekaragaman, persebaran).

## **2.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Temanggung berbasis jasa ekosistem terdiri dari jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya, dan jasa ekosistem pendukung.

Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan untuk wilayah Kabupaten Temanggung secara umum yang tidak berbatasan dengan lautan, maka jasa ekosistem ini terbatas pada penyediaan makanan pokok hasil bumi bukan hasil laut. Menurut hasil kajian jasa ekosistem pangan, wilayah dengan luasan tertinggi untuk nilai penyedia pangan berada pada Kecamatan Kedu dengan luas total 2.517 Ha. Sementara luasan terluas dengan nilai jasa ekosistem penyedia pangan terendah berada pada Kecamatan Pringsurat dengan luas 1.282 Ha.

Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Temanggung memiliki potensi penyediaan air bersih yang sangat tinggi. Kecamatan Kandangan misalnya, sekitar 60,02% atau seluas 4.313 Ha wilayahnya memiliki nilai jasa ekosistem penyedia Air Bersih yang skalanya tinggi. Begitu juga dengan beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Gemawang yang memiliki 3.845,3 Ha luas potensi penyedia air bersih menurut jasa ekosistem. Ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunungapi dan lembah antar pegunungan/perbukitan memiliki potensi tinggi.

Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 34,38% luas wilayah atau 29.874 hektar. Potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir mencapai 19.399,08 hektar atau 22,33%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 7,93% dari luas Temanggung atau 6.891 hektar. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural lipatan dan patahan mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir.

Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana, wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan

perlindungan bencana. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 27,74% luas wilayah atau 24.099 hektar dengan luas tertinggi berada di wilayah Kecamatan Gemawang. Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 34.654 hektar atau 39,89%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 5,99% dari luas Kabupaten Temanggung atau 5.200,34 hektar dengan luas terbesar di Kecamatan Pringsurat. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Bencana yang mengancam Kabupaten Temanggung antara lain tanah longsor, kekeringan, banjir dan angin puting beliung.

Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengelolaan Dan Penguraian Air Limbah, wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah. Lahan yang berpotensi tinggi dengan luasan mencapai 41,18% luas wilayah atau 35.781 hektar dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Bejen. Potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 26.009,44 hektar atau 29,94% dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Gemawang. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 4,69% dari luas Kabupaten Temanggung atau 4.078,12 hektar dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Bejen. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion dataran kaki gunungapi dan pegunungan struktural mempunyai potensi relatif tinggi. Ekoregion kerucut lereng gunung api, perbukitan struktural patahan dan lipatan, dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi yang rendah. Kondisi lingkungan yang alami dan jenis sampah/limbah akan mempengaruhi penguraian limbah. Kondisi yang alami akan menjamin ketersediaan bakteri atau mikroba pengurai sampah.

Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara, wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dengan luasan mencapai 47,40% luas wilayah atau 41.180, 75 hektar dengan luasan tertinggi berada di Kecamatan Gemawang. Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 19.562,94 hektar atau 22,52% dengan wilayah paling luas untuk nilai ini berada di Kecamatan Pringsurat. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 6,31% dari luas Kabupaten Temanggung atau 5.481,29 hektar dengan luas paling tinggi berada di Kecamatan Pringsurat. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural patahan, lipatan dan kerucut lereng gunung api mempunyai potensi tinggi. Ekoregion dataran aluvial dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi rendah untuk pengaturan.

## **2.8. Kondisi Perekonomian**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sedangkan kontribusi sektor terbesar pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 adalah kategori lapangan usaha industri pengolahan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda. Sementara struktur ekonomi berdasarkan distribusi persentase menurut kelompok kategori diketahui bahwa penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Temanggung adalah lapangan usaha tersier.

Sementara itu PDRB per Kapita pada Kabupaten Temanggung setiap tahunnya selalu naik atau dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Kemudian jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup fluktuatif dimana inflasi terendah Kota Temanggung selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 2,42 persen.

## 2.9. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat. Sampai dengan Tahun 2017, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

## 3. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN TEMANGGUNG

### 3.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Temanggung terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang dianalisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai (SS) terbanyak yaitu:

- **Tujuan 3** yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 35 indikator dan sebanyak 17 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target.
- **Tujuan 16** yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 39 indikator dengan capaian yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 9 indikator.
- **Tujuan 4** yaitu pendidikan berkualitas dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 8 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target.
- **Tujuan 1** yaitu tanpa kemiskinan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 8 indikator.

Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok tercapai (SS) di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 9 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 6 yaitu Air bersih dan sanitasi layak;
- Tujuan 11 yaitu Kota & Pemukiman yang berkelanjutan;
- Tujuan 12 yaitu Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab;
- Tujuan 13 yaitu Penanganan dan perubahan iklim;
- Tujuan 14 yaitu Ekosistem lautan (produksi perikanan tangkap pada perairan umum);
- Tujuan 15 yaitu Ekosistem daratan;
- Tujuan 7 yaitu Energi bersih & terjangkau;
- Tujuan 9 yaitu Industri, inovasi, & infrastruktur; dan
- Tujuan 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Ke-9 tujuan tersebut sebagian besar merupakan indikator untuk pilar lingkungan yang belum memiliki indikator dalam kelompok sudah dilaksanakan dan sudah tercapai.

### 3.2. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Secara keseluruhan capaian indikator TPB pada OPD yaitu sebagai berikut :

No.	OPD/ Dinas	Kode Capaian Indikator					Total Capaian OPD
		SS	SB	TTC	TTT	NA	
1	BPPKAD	1	-	-	-	-	1
2	BPS	1	7	8	5	1	22
3	DKK	17	7	3	4	-	31
4	DISNAKER	1	2	2	-	1	6
5	Dinbudpar	1	2	1	3	1	8
6	DPPKBPPPA	10	4	3	-	2	19
7	DPUPKP	-	5	4	2	-	11
8	Dinsos	3	2	2	1	-	8
9	Dindikpora	9	11	4	1	1	26



No.	OPD/ Dinas	Kode Capaian Indikator					Total Capaian OPD
		SS	SB	TTC	TTT	NA	
10	DINDUKCAPIL	2	1	-	2	-	5
11	BPBD	-	2	-	-	3	5
12	Dintanpangan	-	1	2	3	1	7
13	Dinnakan	-	2	2	1	-	5
14	DPMPTSP	-	-	7	4	2	13
15	BNN, Dinsos	-	-	-	-	1	1
16	BNN, DKK	-	1	-	-	-	1
17	BNN, DKK, Dinsos	-	1	-	-	-	1
18	BNN	-	-	2	1	-	3
19	BNN, DPPKBPPPA	-	-	-	1	-	1
20	Polres	-	-	1	1	-	2
21	Dindikpora / DisNaker	-	-	1	-	-	1
22	DINAS ARPUS	-	-	3	3	1	7
23	Dinpermades	1	-	-	-	1	2
24	DISHUB	-	-	3	-	-	3
25	DLH	-	4	2	2	11	19
26	Dinkominfo	2	3	-	5	2	12
27	Bag Litbang Bappeda	-	-	-	1	-	1
28	Bappeda	-	-	-	-	1	1
29	KESBANGPOL	1	-	1	-	-	2
30	Disperindagkop	-	-	4	1	-	5
31	DPUPKP, Dintanpangan	-	1	-	-	-	1
32	DLH; DINTAN KP	-	-	1	-	-	1
33	BAPPEDA; DPUPKP; DINKES; DLH	-	1	-	-	-	1
34	Bag. Hukum Setda	-	2	-	-	4	6
35	Pembangunan Setda	-	-	-	-	1	1
36	Bagian Humas Setda	3	-	-	-	-	3
37	Ortala Setda	-	1	-	3	-	4
38	BKPSDM	-	-	1	1	-	2
39	Inspektorat	-	-	-	3	-	3
40	Satpol PP	-	-	1	-	-	1
<b>Total Nilai Capaian</b>		<b>52</b> <b>21%</b>	<b>60</b> <b>24%</b>	<b>58</b> <b>23%</b>	<b>48</b> <b>19%</b>	<b>34</b> <b>13%</b>	<b>252</b>

Sedangkan berdasarkan keempat pilar TPB yaitu sebagai berikut :

a. Pilar Sosial

Terdapat 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 123 indikator di pilar sosial, terdapat 40 indikator atau 33% yang mencapai target nasional (SS) dalam RPJMD Kabupaten Temanggung. Sebanyak 32 indikator atau 26% belum mencapai target nasional (SB). Sementara itu, sebanyak 7 indikator atau 6% indikator yang tidak memiliki data (NA) dan 20 indikator (16%) ada data tetapi tidak ada dalam target (TTC). Dari 17 OPD tersebut, DKK merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 29 indikator dan diikuti oleh Dindikpora sebanyak 26 indikator. Dari 32 indikator yang belum mencapai target nasional (SB) dalam RPJMD, sebagian besar indikator berada di Dindikpora sebanyak 11 indikator, DKK sebanyak 7 indikator, dan BPS 3 (tiga) indikator.

b. Pilar Ekonomi

Terdapat 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. OPD yang memiliki tanggung jawab terbanyak adalah BPS yaitu sebanyak 16 indikator. Dari total 50 indikator di pilar ekonomi, terdapat 3 indikator atau 6% yang mencapai target nasional (SS). Sebanyak 7 indikator atau 14% belum mencapai target nasional (SB). Sementara itu, sebanyak 7 indikator atau 14% indikator belum memiliki data (NA).



c. Pilar Lingkungan

Terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan. Dari total 40 indikator di pilar lingkungan, belum terdapat indikator yang mencapai target nasional (SS), 12 indikator belum mencapai target nasional (SB). Selain itu, terdapat 13 indikator yang tidak terdapat data dan 9 indikator yang memiliki data tetapi belum mencapai target daerah. Dari ke-10 OPD tersebut, DLH merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak untuk pilar lingkungan yaitu mencapai 15 indikator.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Terdapat 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar hukum dan tata kelola. Dari total 39 indikator pada pilar hukum dan tata kelola, terdapat 9 indikator atau 23% yang mencapai target (SS) dan 9 indikator belum mencapai target (SB). Sementara 7 indikator tidak memiliki data (NA) dan sisanya 5 indikator ada data tetapi belum menjadi target (TTC). Dari ke-14 OPD tersebut, Bagian Hukum Setda memiliki tanggung jawab TPB terbesar dari antara OPD lainnya di Kabupaten Temanggung.

### 3.3. Peran Para Pihak dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Selain peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berikut peran para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian TPB di Kabupaten Temanggung yaitu:

No.	Nama Lembaga	Peran dalam Pencapaian TPB
1	Forum BUMD	Membantu dalam pelaksanaan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
2	Baznas	Membantu kegiatan sosial seperti peduli rumah, pendidikan, kesehatan
3	Lazis jateng	Membantu modal usaha UKM, fakir miskin

Kontribusi pihak selain OPD adalah untuk kegiatan dalam pilar sosial, dan ekonomi. Pilar sosial mencakup Tujuan 3 Kehidupan sehat & sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan berkualitas, sedangkan pilar ekonomi yaitu Tujuan 8 Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi.

### 3.4. Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Realisasi anggaran terakhir untuk pencapaian TPB dari OPD di Kabupaten Temanggung mencapai 1,209 triliun. Kontributor alokasi anggaran terbesar pencapaian TPB Kabupaten Temanggung adalah pada pilar sosial yang mencapai 1,205 triliun dari anggaran OPD untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Alokasi terbesar pada pilar sosial ini ditujukan pada tujuan 4 yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

## 4. RUMUSAN ISU STRATEGIS KABUPATEN TEMANGGUNG

Rumusan isu strategis Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung yang meliputi indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), indikator yang terdapat datanya tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD (TT) dan indikator yang belum memiliki data (NA).

Maka berikut rumusan isu strategis yang dibagi berdasarkan capaian TPB dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

a. Isu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Sosial meliputi :

- Masih cukup tingginya jumlah rumah tidak layak huni 11.1.1.a
- Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana
- Permukiman kumuh yang mempunyai SK
- Data terpadu penanganan fakir miskin

- Masih tingginya angka kematian ibu (67,45 per 100.000 kelahiran hidup) 3.1.1
  - Masih tingginya Angka Kematian Bayi sebesar 13,20 per 1.000 kelahiran hidup 3.2.1
  - Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) masih berada di bawah target nasional 2.2.2
  - Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 12 tahun 4.3.1
  - Masih perlu peningkatan angka harapan lama sekolah (AHLS) 4.3.1
  - Pendapatan Guru Wiyata Bakti Yang Rendah
- b. Isu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Ekonomi meliputi :
- Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
  - Tingkat kesejahteraan buruh kurang
  - Penggunaan tenaga kerja sementara
- c. Isu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Lingkungan meliputi :
- Belum optimalnya penyediaan rumah tinggal bersanitasi layak
  - Aktivitas galian C
  - Masih perlunya peningkatan Indeks Infrastruktur wilayah (Infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, dan sanitasi pemukiman, kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan)
  - Belum optimalnya penanganan sampah
  - Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana
  - Pembuatan SPAH
- d. Isu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi :
- Perlunya peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran 16.9.1.b
  - Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi

## 5. SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN DAN CAPAIAN TPB

### 5.1. Skenario Kondisi Lingkungan Hidup

Terdiri dari Skenario Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Skenario Sampah, dan Skenario Gas Rumah Kaca.

- a. Skenario Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup  
Berdasarkan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

No	Daya Dukung LH	2017	2023	Keterangan
1	Daya Dukung Air Permukaan	1,24	1,37	Terlampau akibat peningkatan kebutuhan penduduk dan pertanian
2	Daya Dukung Pangan	1,11	1,14	Naik dengan adanya penetapan LP2B dalam RTRW serta didukung jaringan irigasi yang dapat meningkatkan produktivitas
3	Daya Dukung Lahan Terbanjir	2,86	2,84	Turun adanya peningkatan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri
4	Daya Dukung Fungsi Lindung	0,35	0,37	Naik, adanya peningkatan kawasan berfungsi lindung sesuai arahan RTRW

- b. Skenario Sampah

Berdasarkan tabel perkiraan peningkatan jumlah timbulan sampah yang mengikuti pertumbuhan penduduk, pada tahun 2023 timbulan sampah mencapai 168.565 dengan proyeksi penduduk 800.102 jiwa. Dengan kondisi tersebut maka perlu dikembangkan beberapa strategi berikut.

- Peningkatan layanan untuk perkotaan mencapai 100% sedangkan di perdesaan sekitar 20%
- Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R
- Mengembangkan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah landfill.
- Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTSa dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA
- Sesuai Jakstrada Kabupaten Temanggung untuk penanganan sampah sebanyak 70 % dan pengurangan 30 %.

c. Skenario Gas Rumah Kaca

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

## 5.2. Skenario Capaian TPB

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing pilar yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional, indikator yang belum ada dalam target RPJMD dan indikator yang tidak ada data tetapi relevan di Kabupaten Temanggung yang diusulkan untuk dapat dimasukkan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I pada dokumen Exum ini.

## 5.3. Skenario Proyeksi Keuangan

Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan menurut jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan menurut jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II pada dokumen Exum ini.

## 6. REKOMENDASI

Merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Temanggung, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung 2018–2023.

Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| BAB I     | : | menambahkan dasar dan uraian korelasi antara KLHS dan SDGs   |
| BAB II    | : | pada gambaran umum perlu ditambahkan data kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta ditambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Temanggung. Data capaian diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator Outcome/Program dan Indikator Renstra. |
| BAB III   | : | untuk melihat tingkat kemandirian daerah menambahkan analisis share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi.   |
| BAB IV    | : | isu strategis pada RPJMD perlu ditambahkan isu strategis dari KLHS   |
| BAB V, VI | : | -  |

BAB VII, VIII : perlu dimasukkan indikator yang sifatnya outcome program  
Indikator SDGs selain indikator yang bersifat makro daerah dan outcome program  
maka akan dimasukkan dalam Renstra

Lebih lengkap terkait rekomendasi untuk dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun  
2018-2023 dapat dilihat pada Lampiran III pada dokumen Exum ini.

**Lampiran I :**

Tabel Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Temanggung

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>												
<b>TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>												
SB	6.1.1.a	Mencapai akses yang adil merata terhadap air minum yang aman untuk dikonsumsi dan terjangkau	Cakupan layanan air minum yang layak	DPUPKP	%	86.6	89.78	meningkat	100%	1.59	1.70	89
SB	6.1.1. b	Mencapai kondisi jaringan sumber air dalam kondisi baik dan adil	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	DPUPKP	%	5.6	14.38	meningkat	118,6 m3/dtk	4.39	14.27	59.32
		Mencapai ketersediaan air dan terjaga dari sumber pencemaran dan kapasitas air baku tetap stabil	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	DPUPKP	%	72	83.88	tidak ada target nasional				
SS	6.2.1.b	Mencapai akses sanitasi prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	DPUPKP	%	75.51	80.24	meningkat		2.36	3.29	100
SB	6.2.1.d	Mencapai akses menghentikan buang air besar di tempat terbuka	Prosentase Desa ODF (Open Defecation Free)	DINKES	%		7.61	Meningkat (tidak ada target nasional)		-	15.40	100
NA	6.3.2.	Mencapai akses sarana prasarana pengolahan limbah cair sehingga kualitas air terjamin	Fasilitasi pengolahan air limbah pada usaha/ kegiatan skala kecil menengah	DLH	Unit			Meningkat (tidak ada target nasional)		-	-	9
TTC	6.4.2.	Peningkatan jumlah embung dan pengelolaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air baku	Jumlah embung (buah)	DLH, DINTAN KP	Buah	19	23	Ada (tidak ada target nasional)		2.00	12.83	27
TTC	6.5.1.	Tercapainya penyediaan air baku daan terpenuhinya kebutuhan air untuk sarana pertanian dan yang lain	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	DPUPKP		72	83.88	ada (tidak ada target nasional)				
NA	6.b.1.	Tercapainya jumlah kelompok swadaya masyarakat pada pelaksanaan pengelolaan air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih	Jumlah program terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	BAPPEDA, DPUPKP, DINKES, DLH		3	3	Ada				1
<b>TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>												

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SS	11.1.1	Terpenuhinya peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan dengan tetap mempertimbangkan upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	DPUPKP	Hektar	28.81	19.91	Menurun (tidak ada target nasional)		- 4.45	13.35	0.315
TTC		Terpenuhinya peningkatan sarana tempat buang air besar dan merubah perilaku buang air besar sembarangan	% rumah tangga yang menggunakan jamban atau tempat buang air besar dengan menggunakan tangki septik/SPAL	BPS	%	29.3	37.1	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Terpenuhinya pelayanan akses air bersih berkelanjutan dari PAM/PDAM untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat	% kecamatan yang mayoritas penduduknya menggunakan air yang berasal dari PAM/PDAM untuk minum/memasak	BPS	%		17.55	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB	11.1.1.(a)	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar dan menata kawasan kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	DPUPKP	%	95.24	97.01	3,7 juta rumah tangga	3,7 juta			
TTC	11.2.1.(a)	Terpenuhinya akses sarana prasarana transportasi yang terjangkau masyarakat	Jumlah Kecamatan yang melakukan pengembangan angkutan umum dan masal di Kab. Temanggung	DISHUB	Kecamatan	18	18	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT	11.4.1	Meningkatnya jumlah anggota kesenian dan budaya dengan SDM yang berwawasan lingkungan	Cakupan SDM kesenian	DISBUDPAR	%	62.5	75	Meningkat	100	6.25	4.17	100
TTT		Meningkatnya jumlah anggota kesenian dan budaya dan terselenggaranya festival seni budaya yang berwawasan lingkungan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	DISBUDPAR	Paket	3	1	Meningkat	2	- 1.00	0.17	2

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTT		Tercapainya pelestarian budaya masyarakat dan pengelolaan lingkungan untuk melindungi atau mempertahankan keutuhan fisik sebagai sarana pendidikan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan.	DISBUDPAR	%	100	53.19	Meningkat	100	- 23.41	7.80	100
TTC		Terpenuhinya penganut kejawen yang tetap menjaga kelestarian lingkungan	Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME (Jumlah penghayat)/KEJAWEN	DISBUDPAR	Kelompok	12	12	Ada		-	-	12
TTC		Tercapainya peningkatan pelestarian cagar budaya	Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah	DISBUDPAR	%	100	100	Meningkat		-	-	100
SB	11.5.1.(b)	Terealisasinya desa tangguh bencana dengan penyiapan sarana prasarana yang memadai	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD			6.52	Meningkat		3.26	-	3
NA	11.6.1	Terpenuhinya pengurangan produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah (unit)	DLH	%			Meningkat (tidak ada target nasional)		-	-	2
SB	11.7.1. (a)	Terpenuhinya lahan untuk RTH di kawasan perkotaan sebagai upaya mencegah perubahan iklim	Prosentase tersedianya luas ruang terbuka hijau (RTH) dari luasan wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten	DLH	%		35	Meningkat menjadi 80%	80%			
SB	12.4.2.(a)	Tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua limbah udara, cair, tanah yang ramah lingkungan.	Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 bagi pelaku usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pelaku)	DLH	%		60	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	150 juta ton			
SB	12.5.1.(a)	Terpenuhinya kegiatan pengelolaan sampah secara maksimal dan berkelanjutan	Prosentase Bank Sampah yang aktif	DLH	Kelompok		43	20 ton per hari (skala nasional)	20 ton/hari			
SS	12.b.1	Tercapainya peningkatan jumlah wisatawan lokal atau mancanegara	Presentase peningkatan jumlah wisatawan	DISBUDPAR		8	12.27	Meningkat				



AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
	13.2.1		<b>Jumlah emisi karbondioksida (CO2e) untuk masing-masing sektor :</b>									
NA		Pemenuhan kebutuhan energi/listrik untuk sarana transportasi, industri, komersial, rumah tangga	a) Energi	DLH	Ton			Menurun				
NA		Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	b) IPPU (Industrial Processes and Production Use)	DLH	Ton			Menurun				
NA		Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	c) AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Landuse)	DLH	Ton			Menurun				
NA		Mencapai pengelolaan limbah dari semua sektor industri, transportasi secara berkelanjutan	d) Limbah	DLH	Ton			Menurun				
SB		Terlaksananya aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim, terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya secara berkelanjutan.	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara vegetatif (kampung iklim)	DLH	Proklam		2	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB	13.3.1	Tercapainya program untuk menginternalisasikan kegiatan lingkungan pada skala pendidikan	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	DLH			20.14	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI & PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA & MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN												
	14.4.1	Terpenuhinya produksi perikanan darat yang di konsumsi oleh masyarakat secara berkelanjutan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	DINNAKAN	Ton	311.87	664.38	Meningkat menjadi 6.982.560 ton				
TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN												

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB	15.3.1	Tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan Temanggung	DLH	Batang		636,880					
NA	15.6.1	Tercapainya upaya konservasi spesies dan genetik sehingga kelestarian tetap terjaga	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik	Balai Konservasi Sumber Daya Alam				ada (tidak ada target nasional)				
NA	15.a.1	Tercapainya upaya pelestarian dan keanekaragaman hayati	Meningkatnya sumber daya keuangan untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Balai Konservasi Sumber Daya Alam				ada (tidak ada target nasional)				
PILAR SOSIAL												
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN												
SB	1.2.1*	Mengurangi jumlah angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	BPS, BAPPEDA, DINSOS	%	11.76	11.46	Menurun menjadi 7-8%	7-8 %			
SS	1.3.1 (a)	Terpenuhinya peserta penerima bantuan secara adil dan merata	Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DINSOS, DKK,RSU	%	100	100	Meningkat menjadi 95%	95%			
SB	1.3.1 (b)	Terpenuhinya peserta penerima jamsostek secara adil dan merata	Meningkatnya kepesertaan jamsostek	NAKER/ BPJS KETENAGAKERJAAN	%	95.2	74	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal			
SS	1.3.2 (c)	Terpenuhinya akses pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas secara merata	Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	DINSOS	%		100	Meningkat menjadi 17,12%	17.12%	-	-	100

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SS		Tercapainya peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	DINSOS	%		100	tidak ada target nasional				
SS	1.3.1 (d)	Tercapainya peningkatan pelayanan bantuan tunai secara merata	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	DINSOS	KPM	15303	18769	Menurun menjadi 2,8 juta	2.8 juta	1,733.00	463,538.50	33528
TTC		Meningkatnya prosentase yang terlindungi kesehatannya	Persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	DINSOS	%	17.67	33.91	tidak ada target nasional				
SS		Meningkatnya pemenuhan kartu kesehatan secara adil dan merata dan pelayanan kesehatan yang maksimal	Jumlah rumah tangga yang menerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	DINSOS	%		162	tidak ada target nasional				167
NA		Meningkatnya prosentase pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga tidak mampu	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima pelayanan sosial	Bid. Perencanaan Bappeda				tidak ada target nasional				
SB		Meningkatnya prosentase pendidikan dasar bagi warga tidak mampu	Persentase siswa miskin penerima bantuan untuk menempuh pendidikan dasar	DISDIKPORA		67.62	60.69	tidak ada target nasional				
TTC	1.4.1 (a)	Terpenuhinya sarana rumah bersalin dengan tingkat pelayanan yang baik	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	DKK		100	100	Meningkat menjadi 70%				
SS	1.4.1 (b)	Terpenuhinya target imunisasi dasar lengkap usia 0-12 tahun	Persentase Anak Usia 0-12 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	DKK	%	98	96.19	Meningkat menjadi 63%.				
SS		Terpenuhinya target imunisasi dasar lengkap usia 1 tahun	Persentase Anak Usia 1 tahun (12-23 bulan) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	DKK	%	98	99.65	tidak ada target nasional				

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB	1.4.1 (d)	Mencapai akses yang merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat perkotaan	Cakupan Rumah tangga dengan Akses air bersih yang layak di perkotaan	DKK	%	84.4	81	Meningkat menjadi 100%.	100%	- 1.70	3.17	90
SB		Mencapai akses yang merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat pedesaan	Cakupan Rumah tangga dengan Akses air bersih yang layak di pedesaan	DKK	%	65.4	73.4	Meningkat menjadi 100%.	100%	4.00	4.43	75
SB	1.4.1 (e)	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata	Cakupan pelayanan sanitasi pemukiman yang layak	DKK	%	74.5	80.24	Meningkat menjadi 100%.	100%			
TTT	1.4.1 (f)	Mencapai akses terhadap cakupan rumah layak huni, aman, terjangkau, sehat	Cakupan rumah tidak layak huni	DINSOS	%	4.34	6.5	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	40% penduduk berpendapatan terbawah			
SS	1.4.1 (g)	Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan fasilitas pendidikan SD sederajat	Presentase APM SD sederajat	DINDIKPORA	%	95.49	96.59	Meningkat menjadi 94,78%	94.78%	0.55	- 0.30	98,3
SS	1.4.1 (h)	Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan fasilitas pendidikan SMP sederajat	Presentase APM SMP sederajat	DINDIKPORA	%	83.73	87.15	Meningkat menjadi 82,2%	82.20%	1.71	- 0.83	88
SS	1.4.1 (j)	Terpenuhinya penduduk yang mendapatkan akta kelahiran	Presentase kepemilikan akta kelahiran	DINDUKCAPIL	%		97.55	Meningkat menjadi 77,4%.	77.40%			
SS		Tercapainya desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana.	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD	%		6.52	Meningkat menjadi 39 daerah				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTC		Terpenuhinya jumlah anggota TAGANA yang mumpuni untuk penanggulangan bencana	Jumlah TAGANA yg dikerahkan ke lokasi bencana	DINSOS	Orang	110	92	Meningkat menjadi 151 ribu				
TTC		Terpenuhinya personel team pelayanan psikososial di kawasan bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	DINSOS	%	100	100	Meningkat menjadi 81,5 ribu				
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
SB	2.1.1*	Terpenuhinya ketahanan pangan, ketersediaan pangan, strategi pangan regional	Tercapainya ketersediaan pangan utama	DISHANPAN	Ton	110634	114477	tidak ada dalam target nasional				
SB	2.1.1.(a)	Terdapatnya pengelola penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, khususnya untuk daerah dengan kemiskinan rendah.	Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita	DKK		6.56	4.01	Menurun menjadi 17%	17%			
NS	2.1.2 (a)	Tercapainya pengurangan kelaparan khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS				Menurun menjadi 8,5 %	8.50%			
TTT	2.2.1.(a)	Terpenuhinya target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DKK	%	33.3	30.6	Menurun menjadi 28%	28%	- 1.35	- 0.43	<20
SS	2.2.2*	Terpenuhinya target penurunan gizi buruk secara merata usia balita	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (0-60 bulan)	DKK	%	0.75	0.35	Menurun				<1
SS	2.2.2 (a)	Terpenuhinya target penurunan anemia ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DKK	%	5.04	14.87	Menurun menjadi 28%	28%	4.92	2.19	<23
SS	2.2.2 (b)	Tercapainya pemberian ASI eksklusif sampai usia dua tahun	Cakupan ASI Eksklusif	DKK	%	83.1	82.2	Meningkat menjadi 50%	50%	- 0.45	- 5.37	80
SB		Terpenuhinya produktivitas pertanian untuk konsumsi pangan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	DISTANPANGA N	%	89.5	87.5	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5;				
TTC		Mengandalkan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Persentase penguatan cadangan pangan	DISTANPANGA N	%	8.8	10	tidak ada target nasional				

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTT		Meningkatnya produksi padi dari pertanian lokal	Produksi Padi (ton) *RADPG	DISTANPANGA N	%	6.7	6.59	tidak ada target nasional				
TTT		Meningkatnya produksi jagung sebagai alternatif pangan non beras	Produksi jagung (ton) *	DISTANPANGA N	%	4.3	4.5	tidak ada target nasional				
TTC		Meningkatnya produksi daging dari peternakan lokal	Produksi daging (Kg) statistik Kabupaten	DINNAKAN	Kg	274428.49 8	615498	tidak ada target nasional				
TTC		Meningkatnya produksi telur secara merata di semua peternakan	Produksi telur (kg)*statistik Kabupaten	DINNAKAN	Kg	2,787,578	7,364,796	tidak ada target nasional				
TTT		Meningkatnya produksi susu dari peternakan lokal	Produksi susu (lt)	DINNAKAN	Liter	98990.25	226575	tidak ada target nasional				
SB		Meningkatnya jumlah produksi ikan darat yang dikonsumsi warga	Tingkat Konsumsi ikan	DINNAKAN	kg/kapita /tahun	16.2	19.7	tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun				
TTC	2.3.2	Meningkatnya pendapatan sebagai kontribusi terbesar rumah tangga usaha pertanian	Rata-rata pendapatan dari rumah tangga usaha pertanian	BPS			102.17	tidak ada target nasional				
TTT	2.a.1	Tercapainya perkembangan investasi semakin cepat	Perkembangan nilai investasi/laju investasi	BPS		2.74		tidak ada target nasional	10	-	-	10
TTT		Tersedianya Kajian Potensi Sumberdaya	Presentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	DPMPSTSP	%			tidak ada target nasional	100	-	-	100
TTC		Terpenuhinya strategi pelayanan penanaman modal dan ketersediaan SDM	Presentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	DPMPSTSP	%		100	tidak ada target nasional	100	-	-	100
NA		Tersedianya informasi peluang usaha di sektor atau unggulan terbesar	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor bidang unggulan	DPMPSTSP	%			tidak ada target nasional	100	-	-	100
NA		Adanya penilaian permohonan serta penerbitan izin prinsip & izin prinsip penanaman modal	Presentase peningkatan penerbitan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)	DPMPSTSP	%			tidak ada target nasional				
NA		Adanya penilaian permohonan serta penerbitan izin usaha penanaman modal	Persentase peningkatan izin usaha penanaman modal (IUPM)	DPMPSTSP	%			tidak ada target nasional				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTT		Tercapainya realisasi peningkatan investasi untuk penanaman modal	Presentase peningkatan nilai realisasi investasi tipe 1 dan tipe 2	DPMPTSP	%		40	tidak ada target nasional				
TTT		Tersedianya perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa	Presentase peningkatan kepedulian investasi	DPMPTSP	%		40	tidak ada target nasional				
TTC	2.c.1	Adanya realisasi penyerapan beras dan gabah Perum Bulog	Harga gabah di tingkat petani (GKP) *RADPG	DINTANPANG AN	Rp/Kg	3800	4300	tidak ada target nasional				
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
SB	3.1.1*	Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	DKK	per kilo mil	27.42	67.45	Menurun menjadi 306	306	20.02	39.76	95
SS	3.1.2*	Terpenuhi tenaga kesehatan yang terampil dan cepat bertindak	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	DKK	%	94	100	Meningkat menjadi 95%	95%			
SS	3.1.2 (a)	Terpenuhi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DKK	%	100	100	Meningkat menjadi 85 %	85%	-	2.50	100
SS	3.2.1*	Menurunnya angka kematian balita	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DKK	Per mil	26.89	15.23	Menurun		- 5.83	-	15,0
SS	3.2.2*	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani (%)	DKK	%	100	100	Meningkat		-	-	9
			Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	DKK	%	11.16	9.54	Menurun				
SB	3.2.2 (a)	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DKK	Per mil	16.82	13.2	Menurun menjadi 24	24	- 1.81	1.80	10



**Executive Summary**  
 KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB	3.2.2 (b)	Terdapatnya Data berisi mengenai jumlah desa yang menjalani UCI (Universal Child Immunization) atau seluruh anak di desa itu telah diimunisasi	Presentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan	DKK	%	99.65	99.65	Meningkat menjadi 95%	95%	-	- 0.78	100
TTC	3.3.1	Mengakhiri epidemi AIDS , melakukan pengawasan serta sosialisasi	Penemuan penderita HIV	DKK		0.04	0.004	Menurun menjadi <0,5%	<0,5	- 0.02	0.08	<0,05
TTC	3.3.2	Mengakhiri epidemi tuberkulosis dan melakukan penyuluhan kesehatan	Penemuan penderita Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk	DKK	Per 100.000		553	Menurun menjadi 245	245	276.50	- 51.33	170
SS	3.3.3 (a)	Mengakhiri epidemi malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk	DKK	Per Mil	0.01	25.12	Menurun		12.56	-	<1
SS	3.3.5*	Mengakhiri penyakit kusta dan mencegah penularannya	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	DKK	Per Mil	0.8	0.66	Menurun		- 0.07	-	<1
TTC	3.4.1	Mencegah atau memerangi hepatitis penyuluhan sanitasi lingkungan	Penemuan penderita Diabetes Melitus (DM)	DKK	%		56.78	Menurun (tdk ada target nasional)		-	-	100
TTT		Tercapainya pemenuhan program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	DKK	%		5.4	Menurun (tdk ada target nasional)				
SB	3.4.1 (b)	Terpenuhinya data masyarakat penderita hipertensi	Penemuan penderita hipertensi	DKK	%		36.76	Menurun menjadi 24,3%	24.30%	-	- 2.08	100
SS	3.4.2 (a)	Bertambahnya Puskesmas untuk pelayanan kejiwaan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (masuk ke kementerian)	DKK	Unit	2	25	Meningkat menjadi 280	280	11.50	42.50	26
NA	3.5.1 (b)	Terpenuhinya data secara akurat, pecandu narkoba yang sudah direhabilitasi	mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi	BNN	Orang			Meningkat(tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTC	3.5.1 (c)	Terpenuhinya data secara akurat, pecandu NAPZA yang sudah direhabilitasi	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai standart pelayanan	BNN	Orang		12	Meningkat menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti menjadi 4.319				
TTC		Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi NAPZA	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai standart pelayanan	BNN	Orang		37	Meningkat menjadi 85 %	85%			
TTC		Terwujudnya penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba	Jumlah advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta	BNN	Advokasi		3	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Terselenggaranya kegiatan P4GN di masyarakat umum	Jumlah Informasi P4GN yang disampaikan kepada keluarga, pelajar, pekerja dan kelompok masyarakat	BNN	Infomasi		18	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat anti narkoba di masyarakat atau instansi pemerintah	Jumlah program Pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, dunia usaha, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan	BNN	Pemberda yaan		4	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Terpenuhinya Rencana Aksi P4GN dalam Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	Terwujudnya kemandirian masyarakat dan Stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	BNN	Angka Indeks		2.6	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC	3.6.1	Tercapainya penurunan angka kematian karena kecelakaan	Jumlah orang yang meninggal dunia karena kecelakaan atau lalu lintas	Polres	Orang	114	58	Menurun				
TTC		Tercapainya penurunan luka berat karena kecelakaan lalu lintas	Jumlah orang yang cedera/luka berat kecelakaan jalan atau lalu lintas	Polres	Orang	4	2	Menurun				

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SS	3.7.1 (a)	Terpenuhinya data pengguna kontrasepsi	Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49	DPPKBPPPA	%	81.66	82.73	Meningkat menjadi 66%	66%			
SS		Terdatanya dengan akurat peserta KB aktif	Presentase kepersertaan KB aktif	DPPKBPPPA	%	83.2	83.42	Meningkat				
SS	3.7.2 (b)	Peningkatan pengguna kontrasepsi jangka panjang	Presentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	DPPKBPPPA	%	51.327	48.05	Meningkat menjadi 23,5%	23.50%			
SS	3.7.2*	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	DPPKBPPPA	%	29.43	29.43	Menurun menjadi 38	38			
SB	3.8.1(a)	Terpenuhinya pelayanan KB	Presentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmeetneed	DPPKBPPPA	%	5.5	7.19	Menurun (tidak ada target nasional)				
SB		Terpenuhinya pelayanan kesehatan	Unmeet need pelayanan kesehatan	DPPKBPPPA		9.86	5.1	Menurun menjadi 9,91%	9.91			
SS		Mengakhiri dan memerangi HIV lebih dini	Persentase angka kasus HIV yang diobati	DKK	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)		-	-	100
SB		Berkurangnya penduduk yang terkena TB	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	DKK	%	81.45	85	Meningkat (tidak ada target nasional)		1.78	-	90
SS	3.8.2. (a)	Tercapainya penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	DKK	%	100	100	Meningkat menjadi minimal 95%	95%			
	3.a.1*	Berkurangnya warga yang merokok pada usia dini	Persentase merokok pada penduduk usia <= 18 tahun	BPS	%	5.99	6.89	Menurun menjadi 5,4%	5.40%			
<b>TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT</b>												
TTC	4.1.1*	Angka kelulusan SD/MI	Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada tingkat 2/3, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan	Dindikpora	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTC		Angka kelulusan SMP/MTs	minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin	Dindikpora	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Angka Kelulusan SMA/ SMK/SMALB/MA		Dindikpora	%	99.86	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dindikpora	%	86.11	92.2	Meningkat menjadi 84,2%	84.20%			
SS	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dindikpora	%	88.68	87.85	Meningkat menjadi 81%	81%			
NA	4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dindikpora	%	63.33	0	Meningkat menjadi 84,6%	84.60%			
SB	4.1.1 (d)	Presentase APK SD sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Dindikpora	%	109.43	112.13	Meningkat menjadi 114,09%	114.09%			
SB	4.1.1 (e)	Presentase APK SMP sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dindikpora	%	97.17	95.4	Meningkat menjadi 106,94%	106.94%			
SB	4.1.1 (f)	APK SMA/Sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Dindikpora	%	60.76	57.06	Meningkat menjadi 91,63%	91.63%			
SB	4.2.2 (a)	APK PAUD/ TK	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindikpora	%	67.66	68.13	Meningkat menjadi 77,2%	77.00%			
TTC	4.3.1	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Dinas Dikpora / Dinas Naker	%	6.67	7.3	Meningkat (tidak ada target nasional)				

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTC		Persentase kecamatan memiliki PKBM dan TBM		Dinas Dikpora	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Harapan Lama Sekolah (HLS)		BPS		11.89	0	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Rata-rata Lama Sekolah		BPS		6.52	0	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8.8 tahun			
TTT		Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun		DINAS ARPUS	%	63.13	83.1	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Jumlah koleksi buku yang tersedia		DINAS ARPUS	EKSEMPLAR	28560	49184	Meningkat (tidak ada target nasional)				
NA		Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (gedung & koleksi)		DINAS ARPUS				Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Persentase perpustakaan desa yang sudah dilakukan pembinaan		DINAS ARPUS	%	0.05	0.16	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Jumlah sumber daya manusia Perpustakaan yang telah mengikuti bintek		DINAS ARPUS	perpustakaan	25	24	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Persentase Peminjam Buku Perpustakaan terhadap jumlah pengunjung		DINAS ARPUS	%	74	83	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Persentase perpustakaan yang aktif		DINAS ARPUS	PERPUSTAKAAN	2	5	Meningkat (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SS	4.4.1*	Jumlah Pengelola SID yang dilatih	Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi	Dinpermades	DESA		172	Meningkat				
SB	4.5.1 *	Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Dindikpora	%		0.96	Meningkat				
SS		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B		Dindikpora	%		1.07	Meningkat				
SB		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A		Dindikpora	%	0.9	0.94	Meningkat				
SS		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B		Dindikpora	%	1.04	1.04	Meningkat				
SB		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMA/SMK/ SMALB/MA/Paket C		Dindikpora	%	1.15	1.13	Meningkat				
SS	4.6.1 (a)	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dindikpora	%	98.1	98.48	Meningkat menjadi 96,1%	96.10%			
SS	4.6.1.(b)	Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun		Dindikpora	%	98.13	98.71	Meningkat				
SB	4.a.1	Presentase SD Negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dindikpora	%		64.32	Meningkat				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB		Presentase SMP Negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana		Dindikpora	%		70	Meningkat				
SB	4.c.1	Presentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dindikpora	%	84.68	70	Meningkat				
SB		Presentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik		Dindikpora	%	88.46	40	Meningkat				
SS		Persentase pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4		Dindikpora	%	93.01	0	Meningkat				
<b>TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>												
NA	5.1.1*	Rasio OPD yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPPKBPPPA	%	2		bertambah sebanyak 16	16			
SB	5.2.1*	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional ) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	DPPKBPPPA		1:2401	1:13500	Menurun (tidak ada target nasional)				
TTC	5.2.2 (a)	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DPPKBPPPA	%	84	100	Menurun (tidak ada target nasional)				
SS		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		DPPKBPPPA	%	100	100	Meningkat menjadi 70%	70%			
SS	5.3.1*	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	DPPKBPPPA	%		63.49	Meningkat menjadi 21 tahun	21 tahun			



**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SS	5.5.1 *	Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	DPPKBPPPA		31.11	31.11	Meningkat				
SB	5.6.1 (a)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	DPPKBPPPA		9.86	7.19	Menurun menjadi 9,9%	9.90%			
SS	5.6.1 (b)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPPKBPPPA		51.327	100	Meningkat menjadi 85%	85%			
PILAR EKONOMI												
TUJUAN 7 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA												
TTC	7.1.1*	Terpenuhinya penduduk yang menikmati listrik	Rasio elektrifikasi	BPS	%		92.24	Meningkat menjadi 96,6%	96.60%	-	0.73	96,0
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA												
SB	8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita (juta rupiah)	BPS	juta	21.59	24.8	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta				
SB	8.3.1. (a)	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	22.73	21.83	51%	51%	- 0.45	4.86	22,50
SS	8.5.2*	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS	%	4.08	4.25	Menurun (tidak ada target nasional)		0.09	-	2,76
SS		Terdatanya indikator atau tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	BPS	%	86.21	89	Meningkat (tidak ada target nasional)		1.40	-	75.00
SS		Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	DISNAKER	%	81.7	80	Meningkat (tidak ada target nasional)		- 0.85	-	45.00

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB		Terdatanya dan terpenuhinya pencaker yang ditempatkan	Persentase besaran pencaker yang ditempatkan.	DISNAKER	%	79.7	75	Meningkat (tidak ada target nasional)		- 2.35	-	69.00
SB		Menggalakkan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	DISPERINDAG KOP	%		44	Meningkat (tidak ada target nasional)		-	-	34.00
SS	8.5.2 (a)	Terdatanya jumlah penduduk setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	6.36	3.7	Menurun		- 1.33	-	3.63
SB	8.6.1*	Terdatanya naker terampil pada bidang tertentu	Persentase tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	DISNAKER	Orang	560	416	Meningkat		- 72.00	-	60.00
TTC	8.7.1	Terdatanya di semua wilayah jumlah anak yang bekerja	Persentase dan jumlah anak usia 15-17 tahun, yang bekerja	BPS	%	27.18	16.65	Menurun (tidak ada target nasional)				
NA	8.8.1	Menurunnya atau tidak adanya pelanggaran norma keteagakerjaan	Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	DISNAKER				Menurun (tidak ada target nasional)				
SB	8.9.1. (a)	Terpenuhinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara setiap tahunnya di Kabupaten Temanggung	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	DINBUDPAR	Orang	435	107	Meningkat				
SS	8.9.1. (b)	Terpenuhinya jumlah wisatawan nusantara setiap tahunnya di Kabupaten Temanggung	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	DINBUDPAR	Orang	395717	491037	Meningkat				
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN												
TTC	9.1.1	Peningkatan infrastruktur jembatan	Presentase jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang	DPUPKP	%	84	90	Meningkat				
TTC	9.1.1. (a)	Peningkatan infrastruktur jalan	Presentase jalan kabupaten kondisi baik	DPUPKP	%	70	82.42	Meningkat		6.21	-	85.50
TTC	9.1.2	Tepenuhinya ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang melayani pedesaan	DISHUB	Unit	612	612	Meningkat		-	-	85.50
TTC		Terdapatnya informasi data jumlah penumpang yang masuk terminal	Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal	DISHUB	Orang	9587052	6260332	Meningkat				
TTC	9.2.1*	Adanya data dan pengelolaan industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	BPS	%	26.47	27.05	Meningkat (tidak ada				

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
								target nasional)				
SB	9.2.1.(a)	Terpenuhinya pertumbuhan industri manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS		5.6	5.08	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB				
SB	9.2.2*	Terpenuhinya dengan seimbang jumlah karyawan pada sektor industri	Proporsi tenaga kerja sektor industri terhadap total tenaga kerja	BPS		26.97	13.78	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS		Tercapainya jumlah naker di sektor industri	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	BPS		11448	58075	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS	9.3.1*	Tercapainya peningkatan kualitas produk yang sudah melalui pelatihan teknis, peningkatan mutu produk dan design	Jumlah produk OVOP	DISPERINDAG KOP	Unit		3	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB	9.3.2*	Adanya data atau informasi peningkatan usaha mikro, kecil, menengah (metadata)	Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	DISPERINDAG KOP	%		44	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC	9.4.1.(a)	Penurunan jumlah emisi	Jumlah emisi karbondioksida (CO2e)	DLH				berkurang, mendekati 26%	26.00%			
NA		Peningkatan status mutu air	Informasi status mutu air (SPM)	DLH				Meningkat (tidak ada target nasional)				
NA		Peningkatan status mutu udara ambien	Persentase informasi status mutu udara ambien (SPM)	DLH				Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Adanya informasi atau aduan dari warga	Presentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	DLH	%		100	Menurun (tidak ada target nasional)				
TTC	9.5.1	Peningkatan belanja modal agar tetap stabil	Alokasi APBD untuk penelitian dan pengembangan (juta)	Bag Litbang Bappeda	juta	100	1200	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT	9.c.1. (b)	Berkembangnya teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan teknologi informasi terintegrasi	DINKOMINFO	%	50	50	Meningkat (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTT		Peningkatan jumlah desa yang terpenuhi akses jaringan internet	Rasio Desa dan Kelurahan yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten	DINKOMINFO	%	4.84	12.46	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Peningkatan perangkat desa yang terpenuhi akses jaringan internet	Rasio Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten	DINKOMINFO	%	35	69.12	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Terpenuhinya jaringan wifi di area publik	Rasio Area Publik yang terhubung dengan jaringan Wifi Pemerintah Daerah Kabupaten	DINKOMINFO	%	35	45	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Pengelolaan dan peningkatan sistem informasi	Rasio Sistem Informasi E-Government yang berfungsi optimal	DINKOMINFO	%		28.78	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Terpenuhinya layanan masyarakat	Rasio subdomain desa yang menggunakan domain desa.id	DINKOMINFO				Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTT		Terpenuhinya layanan informasi	Rasio Sistem Informasi E-Government yang terintegrasi	DINKOMINFO				Meningkat (tidak ada target nasional)				
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA												
NA	10.1.1*	Adanya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	BPS				Menurun menjadi 0,36	0.36			
SB	10.1.1.(a)	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	BPS	%	11.76	11.46	Menurun menjadi 7-8%	7-8 %			
NA	10.1.1.(d)	Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	prosentase desa/jumlah desa yang mempunyai predikat desa maju dan mandiri	DINPERMADE S				Meningkat paling sedikit 2.000 desa				
SS	10.1.1 (e)	Terpenuhinya tingkat perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi	BPS		5.21	5	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS		PDRB per kapita	PDRB Perkapita	BPS		21.59	24.92	Meningkat (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
TTC	10.3.1	Tercapainya pemenuhan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan	Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	DPPKBPPPA			100	Menurun (tidak ada target nasional)				
SS	10.4.1.(b)	Terpenuhinya secara merata jamsostek	% besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek	DISNAKER		95.2	74	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta				
TUJUAN 17 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA												
TTT	17.5.1	1. Persentase pelayanan perizinan online	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	DPMPPTSP		25	21.5	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		2. Persentase perizinan yang bebas calo		DPMPPTSP		100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		3. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu		DPMPPTSP		95	57.53	Meningkat (tidak ada target nasional)				
	17.11.1		Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global									
TTC		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan		Disperindagkop	%	2.08	7.52	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB		BPS		26.53	27.13	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		BPS		20.32	20.38	Meningkat (tidak ada target nasional)				
TTC	17.11.1 (a)	Nilai Ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Disperindagkop			96578151	Meningkat (tidak ada target nasional)				
PILAR HUKUM												
SS	16.1.2.(a)	Terselesaikannya konflik sosial dengan baik	Persentase penanganan konflik sosial	KESBANGPOL				Menurun (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB	16.1.3.(a)	Menurunnya atau tidak adanya KDRT pada perempuan dan anak	Rasio KDRT pada perempuan dan anak	DPPKBPPPA	rasio	1:2401	1:1450	Menurun (tidak ada target nasional)				
SS	16.2.1	Terlindunginya anak korban kekerasan dan terpenuhinya pemulihan psikologis secara sempurna	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	DPPKBPPPA	%	100	100	Menurun (tidak ada target nasional)				
NB	16.2.1.(b)	Tidak adanya lagi perempuan dan anak korban kekerasan	Presentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DPPKBPPPA	%		0.04	Menurun				
SB	16.6.1*	Bertambahnya PNS yang studi lanjut ke jenjang lebih tinggi	Persentase PNS lulusan S2/S3	BKPSDM	%	4.1	4.7	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Bertambahnya karyawan yang mendapat kenaikan jabatan	Promosi jabatan struktural secara terbuka	BKPSDM		4	5	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS	16.6.1 (a)	Adanya standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	Laporan Keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	BPPKAD		WTP	WTP	Meningkat menjadi 60%	60%			
NA	16.6.1.(c)	Tercapainya peningkatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparans dan akuntabilitas	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Pembangunan Setda				Meningkat menjadi 80%	80%			
SB	16.6.2.(a)	Adanya penilaian terhadap tingkat kepatuhan standart pelayanan unit	Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap standar pelayanan	ORTALA SETDA	predikat/in deks	15.34	56	Meningkat menjadi 80%				
SB		Terpenuhinya UPP bersertifikat	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat	ORTALA SETDA	%		3	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Tercapainya pelayanan publik sebagai implikasi dan fungsi dari aparat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	ORTALA SETDA	indeks	75	82	Meningkat (tidak ada target nasional)				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB		Tercapainya target dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat	Terselesaikannya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	ORTALA SETDA	%	80	84	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	DPMPTSP	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS		Informasi jumlah aduan yang sudah selesai	1. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	DPMPTSP	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS		Informasi jumlah gugatan yang sudah diselesaikan	2. Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan	DPMPTSP	%	100	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Tercapainya jumlah penduduk yang mempunyai e-KTP	Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP	DINDUKCAPIL		0.9	0.9	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Pemenuhan jumlah akta kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	DINDUKCAPIL	%		97.54	Meningkat (tidak ada target nasional)				
NS		Adanya rencana aksi	Implementasi Aksi PPK	BAPPEDA				Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Adanya sistem pengendalian dalam suatu organisasi	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	INSPEKTORAT	OPD	10	7	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Adanya indikator kerja untuk pencapaian target	Tingkat Kematangan/Maturitas SPIP	INSPEKTORAT			3.045	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SB		Adanya internal audit sebagai pencapaian kapabilitas	Tingkat Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	Level	1	2	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS		Adanya ketertiban dan penegakan hukum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	SATPOL PP	%	95.24	100	Meningkat (tidak ada target nasional)				
SS	16.9.1.	Terealisasinya kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	DINDUKCAPIL	%		6.38	Meningkat (tidak ada target nasional)				



AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
SB	16.9.1.(b)	Peningkatan pelayanan pengurusan akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	%	1.78	64	Meningkat menjadi 85%	85%			
SS	16.10.2*	Adanya monitoring secara rutin	Persentase PPID badan publik yang aktif	DINKOMINFO			4	Meningkat				
SS		Peningkatan penyiaran yang bermanfaat bagi masyarakat	Persentase (%) kegiatan lembaga penyiaran yg sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku	Bagian Humas Setda	program siar	100	100	Meningkat				
SS		Peningkatan bidang penyiaran	Persentase (%) Pelayanan Pengaturan Bidang Penyiaran	Bagian Humas Setda	%	100	100	Meningkat				
SS		Informasi secara rutin ke masyarakat	penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat per bulan	DINKOMINFO	kali/bulan	1	12	Meningkat				
SB		Informasi data yang akurat	Jumlah lembaga, komunitas, kelompok organisasi masyarakat yang aktif melakukan diseminasi informasi	DINKOMINFO	%		5	Meningkat				
SB		Informasi dalam pemberitaan	Jumlah berita dan informasi yang bersifat lokal maupun nasional yang disampaikan kepada masyarakat	DINKOMINFO	kali/hari		4	Meningkat				
SB		Adanya program penyiaran yang tersalurkan	program dan acara lembaga penyiaran sesuai dengan P3SPS (Pedoman Program Penyiaran Standar Program Siaran) dan jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	DINKOMINFO	%		80	Meningkat				
SS		Tercapainya peningkatan sarana prasarana website	Persentase peningkatan pengunjung website	Bagian Humas Setda	pengunjung/buku tamu	25	90	Meningkat				

AWAL	NO	TARGET	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET 2023
						2015	2017	TARGET	2023	BAU	TPB	
NA		Perwujudan perlindungan dan pemenuhan HAM secara adil	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender	Bagian Hukum Setda				Meningkat				
NA		Adanya bukti yang cukup dalam penyelesaian pelanggaran HAM	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual	Bagian Hukum Setda				Meningkat				
SS		Terpenuhinya secara Konsensual/ Kompromi Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi	Bagian Hukum Setda			80	Meningkat				
NA		Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	Bagian Hukum Setda				Meningkat				
NA		Terdapatnya informasi yang akurat	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan	Bagian Hukum Setda			6	Meningkat				

**Lampiran II :**

Tabel Tabel Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH	KONDISI AWAL	BELANJA DAERAH (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>BELANJA</b>	<b>1.766.724.703.572</b>	<b>1.705.592.427.996</b>	<b>1.806.288.106.500</b>	<b>1.915.112.843.000</b>	<b>2.032.922.001.000</b>	<b>2.160.678.909.000</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.107.398.574.436</b>	<b>1.114.971.567.100</b>	<b>1.147.994.870.304</b>	<b>1.188.394.106.804</b>	<b>1.209.667.907.539</b>	<b>1.291.472.174.435</b>
	Belanja Pegawai	664.754.547.441	730.487.994.725	730.488.202.429	747.488.406.429	747.487.674.664	767.487.674.560
101	Pendidikan		431.564.199.867	437.373.073.481	439.920.946.688	444.036.033.994	448.212.847.608
213	Kepemudaan Dan Olah Raga		5.555.000.000	5.430.000.000	5.430.000.000	5.430.000.000	6.000.000.000
102	Kesehatan		3.758.500.000	3.797.500.000	4.075.000.000	4.100.000.000	4.740.000.000
103	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		10.500.000.000	10.500.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	22.000.000.000
105	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat		1.400.347.875	1.400.347.875	1.400.347.875	1.400.347.875	6.400.347.875
106	Sosial		13.349.612.500	20.127.520.000	20.197.052.500	20.266.585.000	20.369.150.000
207	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		311.462.112.000	328.968.600.000	339.693.600.000	355.743.600.000	379.750.000.000
209	Perhubungan		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
216	Kebudayaan		200.000.000	416.500.000	416.500.000	416.500.000	416.500.000
217	Perpustakaan		50.000.000	50.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
302	Pariwisata		2.500.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000
303	Pertanian		3.000.000.000	3.325.000.000	5.950.000.000	6.075.000.000	7.330.302.000
306	Perdagangan		833.000.000	771.000.000	848.000.000	853.000.000	858.000.000
406	Administrasi Pemerintahan		10.250.000.000	12.525.000.000	12.525.000.000	16.525.000.000	40.250.000.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>659.326.129.136</b>	<b>590.620.860.896</b>	<b>658.293.236.196</b>	<b>726.718.736.196</b>	<b>823.254.093.461</b>	<b>869.206.734.565</b>
101	Pendidikan	24,710,636,500	88.957.000.000	139.666.800.000	157.298.700.000	157.883.690.000	158.190.704.000
102	Kesehatan	199,881,562,000	226.130.871.900	236.923.008.900	252.733.008.900	340.487.311.165	268.298.444.519
103	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50,589,190,090	52.900.600.000	52.000.000.000	67.220.000.000	73.951.390.000	135.670.000.000

**Executive Summary**  
KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2023

104	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	26,793,627,000	21.532.500.000	19.010.000.000	24.010.000.000	24.010.000.000	40.050.000.000
105	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	2,938,585,000	3.300.000.000	3.175.000.000	3.175.000.000	3.175.000.000	3.175.000.000
106	Sosial	5,895,590,450	10.700.000.000	8.270.000.000	8.495.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
201	Tenaga Kerja	1,765,000,000	2.125.000.000	2.063.500.000	2.065.000.000	2.073.500.000	2.082.500.000
202	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	482,165,500	400.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
203	Pangan	300,000,000	2.910.000.000	2.960.000.000	3.070.000.000	3.215.000.000	3.345.000.000
204	Pertanahan	8,240,000,000	700.000.000	25.000.000	700.000.000	35.000.000	25.000.000.000
205	Lingkungan Hidup	8,854,452,500	9.590.000.000	9.390.000.000	9.445.000.000	9.590.000.000	9.885.000.000
206	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,051,451,000	3.612.074.000	3.612.074.000	3.612.074.000	3.612.074.000	3.612.074.000
207	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1,613,790,000	1.750.000.000	1.325.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000
208	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1,675,000,000	2.184.000.000	1.652.000.000	1.739.000.000	1.826.000.000	1.913.000.000
209	Perhubungan	4,824,594,000	5.053.022.000	3.730.000.000	4.445.000.000	4.255.000.000	6.405.000.000
210	Komunikasi Dan Informatika	6,948,160,000	4.332.000.000	3.000.000.000	3.727.000.000	3.727.000.000	4.727.000.000
211	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	85,000,000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
212	Penanaman Modal	90,000,000	1.355.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000
213	Kepemudaan Dan Olah Raga	910,000,000	1.600.000.000	5.690.000.000	5.895.000.000	6.100.000.000	6.910.000.000
214	Statistik	549,720,000	470.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
214	Persandian	672,922,000		75.000.000	85.000.000	95.000.000	95.000.000
216	Kebudayaan	679,000,000	1.125.000.000	2.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	15.000.000.000
217	Perpustakaan	275,000,000	847.000.000	1.803.000.000	1.788.400.000	1.851.320.000	1.916.886.001
218	Kearsipan	1,220,000,000	375.000.000	545.400.000	467.500.000	467.500.000	467.500.000

**Executive Summary**  
 KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2018-2023

301	Kelautan Dan Perikanan	1,212,727,500	1.321.500.000	1.321.500.000	1.321.500.000	1.321.500.000	2.000.000.000
302	Pariwisata	19,907,300,000	1.960.000.000	4.010.000.000	4.020.000.000	4.160.000.000	5.000.000.000
303	Pertanian	3,449,067,000	14.992.500.000	14.722.500.000	15.155.000.000	16.110.000.000	17.370.000.000
306	Perdagangan	319,504,500	4.115.000.000	3.760.000.000	3.760.000.000	3.760.000.000	4.500.000.000
307	Perindustrian	2,419,130,000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
401	Perencanaan	7,124,544,940	3.960.000.000	3.370.000.000	3.420.000.000	3.470.000.000	3.595.000.000
402	Keuangan	2,456,976,800	7.990.000.000	7.785.000.000	7.585.000.000	7.585.000.000	7.585.000.000
403	Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	431,020,000	3.790.000.000	3.790.000.000	3.790.000.000	3.790.000.000	3.790.000.000
404	Penelitian Dan Pengembangan	1,404,080,000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	480.000.000	899.999.999
405	Pengawasan	49,596,129,516	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
406	Administrasi Pemerintahan	64,698,120,629	52.169.735.000	60.778.235.300	61.341.335.300	62.502.590.300	62.908.408.050
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah	24,710,636,500	54.958.057.996	56.190.217.996	56.190.217.996	56.190.217.996	60.190.217.996

**Lampiran III :**

Tabel Rekomendasi sebagai Upaya Tambahan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
<b>PILAR SOSIAL</b>			
<b>TUJUAN 1 : MENGENTASKAN SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>			
1.1	Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	data terpadu penanganan fakir miskin	Menurunkan angka kemiskinan sampai 10,79 %
1.3	Menjamin semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyediaan rumah tinggal bersanitasi layak</li> <li>• Masih cukup tingginya jumlah rumah tidak layak huni</li> <li>• Perlunya peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran</li> <li>• Belum optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga</li> <li>• Perlunya peningkatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.El)</li> <li>• Permukiman kumuh yang mempunyai SK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan air bersih layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga di perkotaan sampai dengan 75 %</li> <li>• Peningkatan pelayanan air bersih layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga di perdesaan sampai dengan 80 %</li> <li>• Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni sampai 7,64 %</li> <li>• Meningkatkan penerbitan akta kelahiran</li> <li>• Meningkatkan penerbitan Kartu Keluarga</li> <li>• Meningkatkan penerbitan KTP El</li> </ul>
1.4	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana	Peningkatan ketahanan masyarakat melalui desa Tangguh Bencana terutama pada kawasan rawan bencana dan desa yang memiliki indeks kerentanan cukup rentan sebesar 10,25 %.
<b>TUJUAN 2 : MENGHENTIKAN KELAPARAN, MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN NUTRISI SERTA MEMPROMOSIKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN</b>			
2.1	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) masih rendah	Meningkatkan prosentase prevalensi balita gizi buruk menjadi 0,5 %
2.2	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan menjadi 28 %</li> <li>• Meningkatkan kualitas konsumsi</li> </ul>

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
	pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat</li> <li>• Tingkat Konsumsi ikan</li> </ul>	<p>pangan menjadi 92,5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun</li> </ul>
2.3	Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya meningkatkan nilai tambah pertanian</li> <li>• Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui RTRW</li> <li>• Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pertanian terutama tadah hujan agar dapat mewujudkan surplus pangan pokok</li> </ul>
<b>TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MEMPROMOSIKAN KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA PENDUDUK DALAM SEGALA USIA</b>			
3.1	mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Masih tingginya angka kematian ibu (67,45 per 100.000 kelahiran hidup)	Menurunkan angka kematian ibu menjadi 30,6 per 100.000 kelahiran hidup
3.2	mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita	Menurunkan angka kematian bayi baru lahir dan balita sampai dengan 11,7
3.3	mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Adanya penyebaran penyakit HIV, tubercolosis, malaria, filariasis dan kusta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan angka kejadian penyakit HIV.</li> <li>• Menurunkan angka kejadian penyakit malaria</li> <li>• Menurunkan angka kejadian penyakit filariasis dan kusta</li> <li>• Menurunkan angka kejadian penyakit tubercolosis menjadi 245</li> </ul>
3.4	mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya menurunkan kematian dini akibat penyakit tidak menular akibat merokok, tekanan darah tinggi, obesitas dan bunuh diri</li> <li>• Perlunya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kasus kematian dini akibat kasus merokok, tekanan darah tinggi, obesitas dan bunuh diri.</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan</li> </ul>



TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023
	kesejahteraan	kesehatan jiwa	jiwa di tingkat puskesmas
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol</li> <li>• Perlunya meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol</li> <li>• meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</li> </ul>
3.6	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menurunkan angka kecelakaan lalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menurunkan presentasinya menjadi 11,83 %</li> </ul>
<b>TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT BAGI SEMUA</b>			
4.1	menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.</li> <li>• Belum tercapainya rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia &gt;15 tahun.</li> <li>• Perlunya meningkatkan kompetensi ketrampilan teknik, kejuruan, kewirausahaan bagi tenaga kerja</li> </ul>	<p>Menaikkan target untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai dengan 114,09%</li> <li>• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat sampai dengan 106,94%</li> <li>• Angka rata-rata lama sekolah sampai dengan minimal 7,8%.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi ketrampilan teknik, kejuruan, kewirausahaan bagi tenaga kerja</li> </ul>
4.5	menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP	Menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP
<b>TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN</b>			
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun		
5.2	Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta	Menurunkan Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Menurunkan kasus KDRT

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
	berbagai jenis eksploitasi lainnya		
5.3	Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)	Menurunkan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun
5.4	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	Meningkatkan proporsi perempuan di kursi DPRD
<b>PILAR EKONOMI</b>			
<b>TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA</b>			
7.1	menjamin akses universal terhadap layanan energy yang terjangkau, andal, dan modern.	Meningkatkan terhadap layanan energy yang terjangkau, andal, dan modern	Meningkatkan terhadap layanan energy yang terjangkau, andal, dan modern menjadi 96,6 %
<b>TUJUAN 8 : MEMPROMOSIKAN KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA</b>			
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Perlunya meningkatkan nilai PDRB per kapita	Meningkatkan PDRB per kapita sampai dengan 50 juta
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Masih rendahnya tenaga kerja formal	Meningkatkan tenaga kerja formal menjadi 51 %
8.5	Secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Masih adanya pengangguran terbuka	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
8.8	menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD akibat masih kecilnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pertumbuhan jumlah wisatawan menjadi 25 %</li> <li>Meningkatkan lama tinggal wisatawan menjadi 1 hari</li> </ul>
8.9	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Masih rendahnya kredit UMKM	Meningkatkan kredit bagi UMKM
<b>TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MEMPROMOSIKAN INDUSTRI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INVESTASI</b>			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi</li> <li>Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>Masih perlunya peningkatan Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik</li> <li>Perlunya meningkatkan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi</li> <li>Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>perlunya peningkatan Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sampai dengan 76,5</li> <li>Peningkatan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet</li> </ul>
<b>TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN DI DALAM DAN ANTAR NEGARA</b>			
10.1	Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</li> <li>Perlunya meningkatkan desa mandiri dan menurunkan desa tertinggal.</li> </ul>	Menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 8 %
10.4	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	Masih rendahnya pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatkan pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
<b>TUJUAN 17 : MENGUATKAN CARA PELAKSANAAN DAN REVITALISASI KERJASAMA GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>			

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
17.5	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Meningkatkan Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
17.11	mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di Negara berkembang	Nilai ekspor non migas	Meningkatkan Nilai ekspor non migas
17.19	mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di Negara berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlunya penggunaan data dan tingkat kepuasan konsumen dengan kualitas data statistik BPS.</li> <li>• pengunjung eksternal yang mengakses data statistik melalui website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penggunaan data dan tingkat kepuasan konsumen dengan kualitas data statistik BPS.</li> <li>• Meningkatkan pengunjung eksternal yang mengakses data statistik melalui website.</li> </ul>
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>			
<b>TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>			
6.1	mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses untuk seluruh rumah tangga baik perkotaan dan perdesaan terhadap layanan air bersih belum tercapai.</li> <li>• Daya dukung air menjadi 1,37 pada tahun 2023 karena peningkatan kebutuhan penduduk, pertanian dan industri</li> <li>• 0,37% berada pada daya dukung fungsi lindung dan 1,14 % dalam daya dukung lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih 75 % untuk perkotaan dan 80 % untuk perdesaan.</li> <li>• Membuat resapan air melalui sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan</li> <li>• Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai, mata air dan waduk untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem tata kelola air dan banjir.</li> <li>• Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah.</li> </ul>
6.2	mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya cakupan terhadap layanan sanitasi layak.</li> <li>• Masih ada Desa/kelurahan melaksanakan Sanitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas layanan sanitasi layak terhadap layanan rumah tangga sampai dengan 100 %.</li> </ul>

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
	perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	<p>Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua Desa/kelurahan yang melakukan BABs.</li> <li>• Masih rendahnya fasilitas infrastruktur layanan air limbah sistem terpusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan desa/kelurahan dalam melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> <li>• Mendorong peningkatan desa/kelurahan dalam melaksanakan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sampai dengan 81 desa.</li> <li>• Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan air limbah sistem terpusat terutama pada kawasan permukiman perkotaan.</li> <li>• Menurunkan emisi GRK dari kegiatan limbah cair domestic dengan sistem IPAL komunal</li> </ul>
6.3	meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya fasilitas IPLT daerah</li> <li>• Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber air baku</li> <li>• Beberapa sungai yang melintas kawasan perkotaan indikator minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran manusia dan industry skala kecil menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan indeks kualitas air untuk mempertahankan kualitas air kelas II dengan seluruh parameter memenuhi baku mutu air yang ditetapkan.</li> <li>• Memfasilitasi pengelolaan limbah rumah tangga terutama untuk menurunkan limbah minyak, colifecal dan coliform yang berasal dari limbah rumah tangga</li> <li>• Fasilitasi pengolahan air limbah pada usaha/ kegiatan skala kecil menengah</li> <li>• Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan (over dosis) untuk menghindari pencemaran air</li> </ul>
6.4	Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Ketersediaan air berdasarkan kebutuhan standart	Peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan bendung sebagai sumber air baku.
6.5	menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Mengatur pola tanam

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
	yang tepat		
<b>TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>			
11.1	menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni
11.5	secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Cakupan desa tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Cakupan desa tangguh bencana</li> <li>• Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang di update secara berkala</li> </ul>
11.6	mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah</li> <li>• Tingkat pelayanan sampah hanya di perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan sampah perkotaan ditingkatkan sampai 100%</li> <li>• Pengurangan sampah di tingkat sumber dengan 3R melalui bank sampah dan TPS 3R</li> <li>• Membuat TPST sebagai alternative pengganti TPA</li> <li>• Membuat TPA baru dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan</li> </ul>
11.7	menyediakan ruang public dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Prosentase tersedianya luas ruang terbuka hijau (RTH) dari luasan wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman</li> <li>• Meningkatkan penyediaan RTH di daerah perkotaan</li> </ul>
<b>TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>			
12.4	mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 bagi pelaku usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Belum adanya pengaturan dan penanganan limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya sosialisasi pengelolaan limbah B3</li> <li>• Penyusunan masterplan pengelolaan limbah B3</li> <li>• Review masterplan pengelolaan persampahan</li> </ul>

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
	manusia dan lingkungan		
12.5	secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Bank Sampah yang aktif</li> <li>• Masih rendahnya sampah yang di daur ulang</li> <li>• Tingkat pelayanan sampah hanya di perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah</li> <li>• Meningkatkan daerah pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan</li> <li>• Pengurangan sampah di tingkat sumber dengan 3R melalui bank sampah dan TPS 3R</li> </ul>
<b>TUJUAN 13: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN</b>			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya menurunkan indeks risiko bencana</li> <li>• Masih adanya korban meninggal terkena dampak bencana</li> </ul>	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim
<b>TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN</b>			
15.1	menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Masih rendahnya proporsi tutupan luas hutan terhadap luas lahan keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah ruang terbuka hijau dan hutan kota pada kawasan perkotaan</li> <li>• Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis</li> </ul>
15.3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	Melakukan penghijauan di lahan kritis yang ada di Kabupaten Temanggung
15.7	mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Ancaman penurunan tutupan lahan yang mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman hayati	Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN</b>			
<b>TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh</b>			

<b>TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>REKOMENDASI 2023</b>
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun	Rasio KDRT pada perempuan dan anak	Menurunkan Rasio KDRT pada perempuan dan anak
16.4	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Menurunkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
16.5	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Perlunya meningkatkan indeks reformasi birokrasi (Nilai SAKIP)	meningkatkan indeks reformasi birokrasi (Nilai SAKIP)
16.7	memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk</li> <li>• Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penerbitan akta kelahiran</li> <li>• Meningkatkan Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur</li> </ul>